

## Evaluasi Peraturan Menteri Desa Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (POSYANTEKDES)

Ragil Abadi<sup>1</sup>, Arief Januwarso<sup>2</sup>, Ahmad Taufiq<sup>3\*</sup>, Ahmad Suprastiyo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bojonegoro, Indonesia

\*Coressponding author: [taufiq.alfazka@gmail.com](mailto:taufiq.alfazka@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [20 February 2024]

Revised [1 April 2024]

Accepted [16 April 2024]

### KATA KUNCI

evaluasi; kebijakan; program posyantekdes

### KEYWORDS

policy; evaluation; posyantekdes program

This work is licensed under a



### ABSTRAK

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan sejauh mana kebijakan dijalankan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran Peraturan Menteri Desa PDTT No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari William Dunn tentang indikator evaluasi kebijakan yaitu : 1) Efektivitas; 2) Efisiensi; 3) Kecukupan; 4) Pemerataan; 5) Responsivitas; 6) Ketepatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Program Posyantekdes dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blora sudah berjalan, namun belum secara optimal. Sebagian besar Posyantekdes yang ada belum aktif menjalankan kegiatan yang ada, yang mana masih didasari oleh kegiatan mengabdikan. Peneliti menemukan data dari 10 kecamatan yang telah dibentuk Posyantekdes pada tahun 2021 baru 13 desa yang telah mendapatkan pendanaan, yang mana dari 13 desa tersebut baru beberapa desa yang aktif dan telah berproduksi serta telah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat sekitar.

### ABSTRACT

Policy evaluation is a process that a person takes to obtain information that is useful for determining the extent to which the policy is implemented, because this kind of determination or decision is not taken randomly, the alternatives must be given relative values, therefore giving the value must require rational considerations based on information for the decision-making process. The aim of the research is to provide an overview of PDTT Village Minister Regulation No. 23 of 2017 concerning the Village Appropriate Technology Service Post Program in Blora Regency. This research is a qualitative descriptive research. The theory used in this research is William Dunn's theory regarding policy evaluation indicators, namely: 1) Effectiveness; 2) Efficiency; 3) Adequacy; 4) Equity; 5) Responsiveness; 6) Accuracy. Data collection techniques are carried out using interview, observation and documentation methods. The data analysis method used in this research is a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results that have been presented, the author can draw the conclusion that the Posyantekdes Program for community empowerment in Blora Regency has been running, but not yet optimally. Most of the existing Posyantekdes are not yet actively carrying out existing activities, which are still based on service activities. Researchers found data from 10 sub-districts that had established Posyantekdes in 2021, only 13 villages had received funding, of which only a few of these 13 villages were active and had produced and had empowered the surrounding community.

## Pendahuluan

Pendahuluan Pembangunan nasional dapat pula memiliki makna sebagai tranformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diharapkan. Baik secara makro (nasional) maupun mikro, proses pembangunan mempengaruhi setiap bidang kehidupan masyarakat, termasuk komponen ekonomi, sosial, budaya dan politik (Deddy T.Tikson,2005). Makna pentingnya dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, daerah diberikan hak kebebasan dan wewenang serta tanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola dan mengurus sendiri kebutuhannya, guna menyejahterakan masyarakatnya dengan sebaik mungkin dan lebih maju. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut agar bisa mengurangi kemiskinan yang ada didaerah tanpa harus menggantungkan pada pemerintah yang ada pusat. Salah satu cara yang dapat diambil yaitu dengan menggali potensi yang ada di setiap daerah masing- masing serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal lagi.

Salah satu faktor penting dalam mencapai mutu kehidupan didalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu Teknologi. Teknologi merupakan faktor utama dalam perubahan masyarakat. Seperti yang telah dituliskan oleh Marshall McLuhan dalam *The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) tentang Teori Determinisme Teknologi*, bahwa perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi sejak zaman dahulu sampai saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat (dalam, Smith dan Marx, 1994). Inovasi teknologi memberikan pengaruh yang besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan dalam masyarakat. Dengan demikian, semakin berkembangnya jaman semua kegiatan dalam kehidupan di kelilingi oleh teknologi. Teknologi merupakan indikator penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Dalam lingkungan masyarakat teknologi sangat penting dalam menunjang efisiensi, efektifitas, dalam melakukan pekerjaan.

Teknologi tepat guna yaitu teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tersebut digunakan atau diterapkan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Teknologi tepat guna juga mengacu pada teknologi yang merupakan alternatif yang tidak dapat didaur ulang, dan ketergantungan manusia yang tidak terkontrol pada teknologi dari teknologi modern, yang mengakibatkan berbagai masalah, termasuk polusi dan pemborosan sumber daya alam (Tanaka, 2012).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui teknologi tepat guna melalui intruksi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya desa pasal 1 ayat 3

menyebutkan bahwa teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang tidak mencemari lingkungan dan tidak merusak. Dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan, sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat yang ada, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek. Di beberapa wilayah Indonesia untuk mempermudah pemusatan pemanfaatan TTG, maka dibentuk Posyantekdes di Kabupaten Blora, pemanfaatan TTG dipusatkan di Posyantekdes yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bentuk dari implementasi Peraturan Permentan Nomor 23 Tahun 2017.

Posyantekdes adalah lembaga pelayanan teknologi tepat guna yang berkedudukan di tingkat desa dengan memberikan pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi serta orientasi teknologi tepat guna dan juga menjembatani masyarakat dalam pemanfaatan, pengurus teknologi tepat guna dengan sumber teknologi tepat guna. Yang memiliki tugas dalam pemetaan kebutuhan masyarakat, menjembatani dan memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan di berbagai sektor. Selain itu posyantekdes tidak semuanya berbentuk alat, namun juga berbentuk sebuah karya dari bidang apapun seperti makanan, obat, sistem dan lainnya. Dengan adanya posyantekdes ini diharapkan dapat menjembatani masyarakat untuk dapat berkarya, menggali potensi yang ada, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang bertujuan utama mengurangi kemiskinan yang ada.

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumberdaya desa guna pengembangan masyarakat yaitu pertama, masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas. Kedua, masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah. Ketiga, pengelola posyantek desa dan posyantek antardesa. Keempat, inventor TTG dan kelima kelompok masyarakat lain.

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dimana salah satunya dapat dilihat dari sisi hutan jatinya yang sangat luas. Selain dari sumber daya alamnya, berdasarkan data BPS pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Blora pada setiap tahunnya selalu meningkat, di mana pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora terus mengalami peningkatan mulai 2018 sampai dengan 2021, Namun peningkatan tertinggi pertumbuhan penduduk pada tahun 2019. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk harus diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang seimbang agar tidak mengalami peningkatan pengangguran sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora tidak mengalami kenaikan. Selain itu, data di Kabupaten Blora menunjukkan kemiskinan terus menerus meningkat kecuali pada tahun 2019 dimana pernah mengalami penurunan, tapi mengalami peningkatan kembali di tahun berikutnya. Peningkatan tersebut harus dapat diimbangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat yaitu salah

satunya dengan program Posyantekdes, yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat untuk dapat menggali potensi yang ada di setiap desa di Kabupaten Blora . Dimana di Kabupaten telah dibentuk Posyantekdes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dari total 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora baru 10 kecamatan telah di bentuk Posyantekdes pada tahun 2021, yang mana dari 10 kecamatan tersebut belum semua desa telah dibentuk Posyantekdes. Sehingga pemerataan terhadap pembentukan program posyantekdes belum terealisasi kesemua desa yang ada di Kabupaten Blora. Yang mana dalam pembentukan Posyantekdes terdapat tujuan yang diharapkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada disekitar.

Berdasarkan Permendes Nomor 23 Tahun 2017 adapun tujuan dari posyantekdes yaitu:

1. Mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar generasi dan intragenerasi
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya.
4. Mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam.
5. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa. (Permendes No 23 Tahun 2017)

Dengan tujuan penerapan Posyantekdes yang optimal di harapkan agar bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada di suatu desa dan dapat melewati semua tantangan di perkembangan jaman, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun nyatanya dalam observasi awal, peneliti menemukan beberapa faktor yang mengarah pada belum optimalnya program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Blora yaitu sebagian besar masyarakat belum dapat memahami apa itu teknologi tepat guna, penyebaran posyantekdes belum bisa diterima masyarakat karena sumber daya manusia yang ditugaskan menjadi pengurus posyantekdes belum memiliki kemampuan yang cukup, dan rendahnya minat masyarakat dalam keikut sertaan dalam posyantekdes. Adanya sosialisasi dan bintek yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Blora disaat pembentukan posyantekdes belum bisa menarik semangat masyarakat dalam menjalankan posyantekdes. Selain itu masih kurangnya binaan dan monev dari implementator dan desa kepada masyarakat dalam menggali potensi yang ada di suatu desa menjadikan hampir semua Posyantekdes yang ada di Kabupaten Blora tidak berjalan dengan optimal

## Metode

Kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Sementara itu jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari enam poin menurut William Dunn (2003), yaitu : a. Efektifitas, penekanan indikator ini terletak pada ketercapaian yaitu : Efektifitas dalam penyediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia dan Efektifitas dalam pembinaan Posyantekdes, b. Efisiensi, penekanan indikator ini terletak pada ketercapaian yaitu : efisiensi waktu pelaksanaan dan efisiensi sumber daya finansial yang diberikan, c. Kecukupan, penekanan indikator ini terletak pada kecukupan insentif dan sarana prasarana yang diberikan, d. Pemerataan, penekanan indikator ini terletak pada pendistribusian kebijakan yang telah dilaksanakan, e. Responsivitas, penekanan indikator ini terletak pada respon ataupun tanggap yang diberikan masyarakat kepada kebijakan yang dijalankan, e. Ketepatan, penekanan indikator ini ketepatan sosialisasi kebijakan yang diterapkan dan tujuan serta manfaat yang didapatkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Total informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 orang yaitu 2 informan utama dan 4 informan pendukung. Teknik analisis yang digunakan adalah model analisis Miles and Huberman.

## Hasil dan Pembahasan

Untuk memberikan gambaran terhadap fokus penelitian berikut dilakukan Analisa dan interpretasi data. Dengan diadakannya analisa data, maka data tersebut diolah sehingga menjadi suatu informasi yang kemudian diinterpretasikan agar bermakna kedepannya.

### 1. Efektifitas

Berdasarkan indikator efektifitas, keberhasilan proses evaluasi kebijakan dengan mengetahui tingkat sumber daya manusianya dan pembinaan yang dilakukan, yang mana diuraikan sebagai berikut:

- a. **Sumber Daya Manusia**, Dalam program pos pelayanan teknologi tepat guna desa di Kabupaten Blora berdasarkan sumber daya manusia yang di pilih dalam melaksanakan program telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Yang mana berdasarkan data di penyajian data diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas PMD Kabupaten Blora sudah dapat dikatakan mumpuni berdasarkan standar Pendidikan yang dimilikinya. Sedangkan sumber daya manusia yang menjadi pengurus posyantekdes yang berada di setiap desa rata-rata lulusan SLTA, dengan pendidikan yang standar untuk menunjang kepengurusan posyantekdes yang merupakan program baru masih kurang. Dimana belum memilikinya keahlian untuk mengelola TTG dan telah memiliki kesibukan pribadi sangat sulit dikatakan suatu kebijakan dapat berjalan dengan cepat. Berdasarkan data tabel gambar yang telah disajikan di penyajian data dapat diketahui dari 73

posyantekdes yang berada di 10 kecamatan hampir semuanya yang memimpin memiliki lulusan Pendidikan SLTA.

- b. **Pembinaan**, Berdasarkan data yang ada di penyajian diatas dapat diketahui bahwa pembinaan pengurus posyantekdes baru diadakan pembinaan secara administrasi saja. Namun, dari pembinaan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan belum 100% dihadiri undangan yang telah diberikan, namun sudah diangka 80% yang hadir. Yang mana masih ada peserta yang tidak hadir karena kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Sejauh ini sudah hampir semua posyantekdes yang telah dibentuk telah diberikan pembinaan secara administrasi. Namun, untuk pembinaan secara paktiknya seperti pelatihan-pelatihan untuk sumber daya manusia khususnya pengurus posyantekdes belum pernah diadakan. Sehingga untuk masalah sumber daya manusianya dalam menjalankan program Posyantekdes dapat dinyatakan kurang. Namun berdasarkan data di penyajian diatas tidak semua sumber daya manusai yang ada di pengurusan posyatekdes kurang optimal, ada beberapa posyatekdes yang telah melalukan kegiatan dengan baik yang mana dapat dilihat dari bukti tabel pelombaan yang perna di ikutinya.

Sehingga berdasarkan Analisa dan interpretasi diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi program sudah berjalan, yang mana dibuktikan dengan telah diadakan suatu pembinaan sumber daya manusia oleh Dinas PMD Kabupaten Blora walaupun baru pembinaan administrasi yang dilaksanakan. Namun, disisi lain peneliti menemukan pandangan lain yang mana pembinaan secara administrasi untuk sumber daya manusia belum cukup untuk menjalan suatu program kebijakan.

## 2. Efisiensi

Berdasarkan indikator efisiensi, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat berdasarkan efisiensi waktu dan sumber daya finansial, yang mana diuraikan sebagai berikut:

- a. **Efisiensi Ketepatan Waktu**, Berdasarkan analisa dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui untuk ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan program Posyatekdes belum dapat dikatakan optimal. Karena dapat dilihat dari penyajian data di atas bahwa dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora baru dilakukan pembentukan Posyatekdes di 10 kecamatan, yang mana dari 10 kecamatan tersebut belum selesai dalam pembentukan posyantekdes di setiap desa. Dari penjelasan diatas salah satu kendala yang dialami dalam pembentukan Posyatekdes yaitu jarak lokasi dari satu desa kedesa lainnya sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara di penyajian data dapat diketahi bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tidak hanya memiliki tugas untuk menjalankan program tersebut juga, dinas pun memiliki tugas lain yang harus diselesaikan juga. Selain itu dapat diketahui di tabel penyajian diatas bahwasanya dalam pembentukan posyantekdes minimal pembentukannya di tingkat kecamatan yang mana di

Kabupaten Blora total 16 kecamatan yang terdiri hampir 271 desa yang memiliki jarak cukup sulit diakses sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat menyelesaikan dengan baik program yang dijalankan ini.

Sehingga berdasarkan analisa diatas dapat diinterpretasikan bahwa untuk ketepatan waktu dalam penyampaian program ke semua desa yang ada di Kabupaten Blora belum dapat dikatakan optimal. Karena masih banyak desa yang belum dibentuk posyatekdes di setiap desanya.

**b. Ketepatan Sumber Daya finansial,** Berdasarkan analisa dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, Sedangkan masalah sumber daya finansial dalam program Posyantekdes belum berjalan secara optimal. Yang mana dapat diketahui dari penyajian data diatas sumber daya finansial belum dapat dirasakan semua posyantekdes yang ada. Hanya posyantekdes-posyantekdes yang telah mengikuti lomba saja yang telah diberikan pendanaan oleh Pemdes nya. Untuk posyantekdes lainnya hampir semuanya belum pernah mendapatkan pendanaan oleh Pemdes. Karena dapat diketahui bahwa kurangnya perhatian Pemdes terhadap posyantekdes menyebabkan masalah pendanaan disampingkan. Sehingga menyebabkan dari 10 kecamatan dengan total 75 posyantekdes yang telah dibentuk di Kabupaten Blora baru ada 13 posyantekdes yang telah mendapatkan pendanaan dengan total semuanya yaitu Rp 206.5000.000. Namun belum semua posyantekdes yang mendapatkan dana telah aktif dan memiliki kegiatan yang produktif.

Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya akan berjalan secara efektif apabila sumber daya manusianya yang dijadikan sudah memiliki pendanaan dalam menjalankan suatu kegiatan. Dan selain itu, tidak hanya sumber daya manusianya saja yang di lihat namun sumber daya finansial seperti pendanaan harus dipertahatkan. Suatu program tidak akan berjalan apabila pendanaan dalam kegiatan tidak ada. Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa sinerjitas yang dibangun dalam implementasi program pelayanan teknologi tepat guna desa telah ada walaupun belum semaksimal yang diharapkan bersama. Yang mana kurangnya perhatian dari pemdes menyebabkan pendanaan anggaran kegiatan posyantekdes belum dapat dirasakan semua posyantekdes.

### 3. Kecukupan

Berdasarkan indikator kecukupan, yang mempengaruhi keberhasilan proses kebijakan dengan pemberian insentif dan sarana prasarana yang diberikan.

**a. Kecukupan pemberian Insentif,** Berdasarkan analisa dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam indikator insentif pada program implementasi kebijakan pelayanan teknologi tepat guna desa berjalan kurang optimal. Yang mana temuan di lapangan mengenai insentif kepegawaian Dinas PMD Kabupaten Blora sudah berjalan sesuai regulasi yang ada, seperti PNS lainnya. Namun sebaliknya untuk insentif kepengurusan posyantekdes belum ada regulasi yang

mengaturinya, yang mana dari temuan dilapangan bahwa kegiatan posyantekdes dilaksanakan dengan rasa sukarela atau mengabdikan pada desa. Yang mana saat ini dapat diketahui suatu kegiatan tidak akan berjalan apabila tidak ada imbal baliknya demi memacu semangat para pelaksana kegiatan yang sedang dijalankan.

Namun, dalam temuan dilapangan peneliti juga menemukan untuk insentif diberikan apabila suatu program yang dijalankan telah berhasil memenangkan suatu perlombaan atau telah memberikan prestasi yang membanggakan. Sehingga diberikan suatu bonus berkat kinerja yang membanggakan yang telah didapatkan. Itupun dapat dikatakan berupa bonus belum insentif bagi kepengurusan posyantekdes.

Sehingga berdasarkan analisa diatas dapat diinterpretasikan bahwa untuk pemberian insentif bagi kepengurusan posyantekdes dapat dinyatakan memang belum ada. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali untuk berjalannya suatu program yang lebih optimal lagi.

**b. Kecukupan Sarana Prasarana,** Berdasarkan analisa dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, Sedangkan dalam hal indikator sarana prasarana dalam kegiatan program posyantekdes, berdasarkan hasil wawancara di penyajian data menyatakan bahwa untuk sarana dan prasarana dalam kegiatan posyantekdes belum ada yang mendapatkan. Hampir semua posyantekdes belum memilikinya, utuk sedungpun hampir semuanya menggunakan / ikut dalam gedung karang taruna yang ada. Sehingga dukungan dari pemerintah diharapkan guna dalam memberikan suatu semangat serta suatu operasional.

Hal ini sejalan dengan Riza Fauziyah dan Muhtadi (2020) menyatakan bahwa Pemerintah daerah juga berpengaruh besar dalam menjalankan program. Dengan begitu suatu faktor yang menjadi unsur proses implementasi kebijakan dapat diberikan kelancaran.

Dengan demikian, dalam analisa yang dilakukan oleh peneliti diatas dapat diinterpretasikan bahwa sinerjitas yang dibangun dalam implementasi program posyantekdes dalam sarana prasarana belum ada dalam kepengurusan posyantekdes yang ada di setiap desa.

#### **4. Pemerataan**

Berdasarkan indikator pemerataan, yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan dilihat dari pemerataan sarana kebijakan yang ada. Berdasarkan Analisa dan interpretasi penelitian dilapangan bahwa yang ada dalam implementasi program Posyantekdes di Kabupaten Blora belum semuanya dilakukan pemerataan program. Yang mana dari total 271 desa yang ada di Kabupaten blora baru 73 desa yang di bentuk posyantekdes itupun belum semuanya telah berjalan dan aktif. Yang mana dapat dilihat di tabel penyajian diatas tentang keaktifan posyantekdes.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan program Posyatekdes memang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa memang dalam pemerataan kebijakan program Posyantekdes belum dilakukan secara merata sesuai yang ditetapkan. Yang mana dapat dilihat di penyajian data bahwa pemerataan dari segi monitoring dan evaluasi sendiri belum dilakukan secara merata. Dari target 73 posyatekdes yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada tahun 2022 baru 48 posyatekdes yang telah dilakukannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut baru terlaksana sekitar 70%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan temuan di lapangan bahwa untuk berjalanya suatu implementasi yang lebih optimal diperlukan pemerataan yang lebih optimal lagi, agar dapat dipahami semuanya tanpa terkecuali, sehingga tidak ada stekhoalder yang dapat memperlambat berjalanya proses implementasi yang di lakukan.

#### **4. Responsifitas**

Berdasarkan indikator responsifitas, yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang dilakukan oleh penulis mengenai respon masyarakat terhadap proses implementasi program pos pelayanan teknologi tepat guna di Kabupaten Blora sebenarnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan program posyatekdes mendapatkan respon kurang baik dari masyarakat namun dari instansi yang ada merespon baik, karena dapat diketahui bahwa manfaat yang dihasilkan apabila suatu posyatekdes dapat berjalan dan aktif akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang ada.

Adapun tanggapan dari informan menyatakan bahwa program posyatekdes merupakan program baru yang belum banyak yang mengetahuinya. Sehingga masyarakat pun masih bingung apabila ditanya mengenai program posyatekdes yang ada. Namun berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan peneliti dalam observasi, bahwa masyarakat akan merespon baik terhadap program apabila diberikan arahan maupun pembinaan terhadap program tersebut, Yang mana dapat dilihat di penyajian data di atas bahwa telah ada posyatekdes yang aktif dan berproduksi yang mana dalam kegiatannya telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan temuan di lapangan bahwa harus adanya pendampingan khusus terhadap pengurus posyatekdes maupun masyarakat. Agar program tersebut dapat direspon masyarakat dengan baik sehingga dapat memberikan dampak yang positif apabila program berjalan dan aktif.

#### **6. Ketepatan**

Berdasarkan indikator ketepatan, yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan dilihat dari ketepatan sosialis terhadap kebijakan. Berdasarkan hasil Analisa dan interpretasi data yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa mengacu pada standar operasional pelaksanaannya bahwa perab dan tanggung jawab atas kegiatan posyatekdes telah disosialisasikan. Hal ini diperkuat dari data informan yang ada telah sesuai melaksanakan sosialisasi yang telah diberikan sebanyak 5 kali di tingkat kabupaten, mulai September 2021 sampai dengan Juli 2022. Yang mana dari sosialisasi telah diberikan materi mulai pengenalan TTG sampai dengan perlombaan TTG. Walaupun dalam sosialis belum 100% dihadiri oleh peserta yang diundang, namun sudah ada sekitar 80% peserta selalu ikut sosialisasi yang diberikan. Namun dalam temuan dilapangan bahwa sosialisasi juga dilaksanakan di tingkat kecamatan dan desa juga.

Penyataan diatas dapat dilihat dengan temuan peneliti dilapangan yang menyatakan bahwa Dinas PMD Kabupaten Blora tidak hanya melakukan komunikasi secara sosialis bersama yang penting-penting saja, melainkan melibatkan semua *stakeholders* yang berpengaruh terhadap program kebijakan ini terutama masyarakat. Sosialisais yang dijalankan yaitu melakukan komunikas ke semua wilayah walaupun dalam penelitian dilapakan ditemukan bahwa dalam pemberian sosialis kadang masih kurang. Dikarenakan wilayah di Kabupaten Blora desa satu dengan desa yang lainnya jaraknya lumayan jauh dan terkadang dipisahkan oleh hutan jati dengan jalan yang masih rusak.

Selain dari ketepatan sosialis yang dilakukan, ketepatan tujuan dan manfaat juga menjadi poin dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis dan interpretasi bahwa untuk ketepatan tujuan dan manfaat dari program posyantekdes belum berjalan secara optimal. Yang mana berdasarkan data dari informan yang didapatkan bahwa belum semua posyantekdes melakukan tujuan atau tugas yang ada di posyantekdes, sehingga menyebabkan posyantekdes tidak aktif dan tujuan serta manfaat belum tercapai sesuai yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan atau diinterpretasikan dari hasil penelitian dan temuan di lapangan bahwa untuk tingkat ketepatan sosialis dalam program posyantekdes sudah berjalan cukup optimal. Namun untuk ketepatan dalam tujuan dan manfaat dari program posyantekdes masih belum optimal, masih banyak posyantekdes yang tidak aktif dalam kegiatannya.

## **Kesimpulan**

Pernyataan Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa aspek yang menjadi fokus pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Desa No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sambong khususnya dan Kabupaten Blora umumnya. Fokus penelitian dalam Evaluasi Peraturan Menteri Desa No.23 Tahun 2017 Tentang Program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa yaitu:

- a. **Efektifitas** : Dalam indikator efektifitas yang menjadi fokus yaitu, Sumber daya sebagai faktor dari implementasi program posyantekdes dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat. Dimana didalam kepengurusan poyantekdes Kabupaten Blora pada umumnya masih banyak sumber daya manusia yang belum aktif untuk mengurus posyantekdes. Sehingga masih banyak yang belum paham dengan adanya posyantekdes yang telah dibentuk. Kurang aktifnya dan partisipasi dari pengurus posyantekdes menjadikan pemberdayaan masyarakat melalui progam posyantekdes belum optimal. Selain itu, dalam segi pembinaan masih belum optimal, yang mana dalam kegiatan baru pembinaan administrai yang diberikan, belum adanya pembinaan teknis dalam kegiatan.
- b. **Efesiensi** : Dalam indikator efesiensi. Ketepatan waktu dalam kegiatan penyampaian kebijakan mengenai program posyantekdes sudah berjalan cukup baik, walaupun dalam temuan dilapangan belum semua desa yang ada di Kabupaten Blora telah dibentuk Posyantekdes. Selain itu, dari segi sumber daya finansial belum berjalan optimal. Dimana dari 73 posyatekdes yang ada Kabupaten Blora baru 13 desa yang telah mendapatka dana untuk kegiatan posyantekdes, yang mana dari 13 desa tersebut belum semuanya telah aktif dan berproduksi sehingga dapat disimpulkan dari segi finansial masih jauh dari optimal.
- c. **Kecukupan** : Indikator yang juga paling berkontribusi muncul dari adanya kecukupan di setiap kebijakan yang dijalankan. Dalam pelaksanaan program indikator insentif sudah berjalan dengan optimal bagi kepegawain Dinas PMD Kabupaten Blora, Namun untuk insentif kepengurusan posyantekdes sendri belum ada, masih didasari rasa suka rela dalam pelaksanaanya. Sedang dalam segi sarana dan prasaran dalam kebijakan posyatekdes dari temuan dilapangan masih kurang. Belum ada posyantekdes yang ada di desa memiliki sarana prasarana lengkap ataupun memadai dalam kegiatan implementasi.
- d. **Pemerataan** : Dalam indikator pemerataan, berdasarkan penjelasan di penyajian data dapat disimpulkan dalam pemerataan kebijakan program Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa masih belum optimal, yang mana dari total 271 desa yang ada di Kabupaten Blora baru 73 desa yang telah di bentuk Posyatekdes. Selain itu dari 73 posyatekdes tersebut baru 48 posyatekdes yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.
- e. **Responsivitas** : Dalam indikator responsivitas, berdasarkan penjelasan di penyajian data dapat disimpulkan bahwa sebenarnya respon masyarakat terhadap program posyatekdes cukup baik, namun perlu adanya pemberitahuan, pemahaman serta pembinaan terhadap masyrakat juga agar mereka juga mengerti terhadap program.

- f. **Ketepatan** : Dalam indikator ketepatan, berdasarkan penjelasan di penyajian data dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam kegiatan sosialisasi terhadap program sudah berjalan cukup baik. Yang mana sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat kabupate, kecamatan serta sampai tingkat desa. Namun sosialisasi yang diberikan hanya kepada pengurus Posyatekdes.

## Referensi

### Jurnal

- Audia Arsyad Nurwinendra, jurnal administrasi public (2016), Vol. 5 No. 2 yang berjudul Analisis Pelaksanaan Program Pengelolaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Desa (BAPERMADES) Provinsi Jawa Tengah
- Widyawati, Budiyo. Roadmap Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Di Kota Surakarta, Jurnal ilmu adminitrasi. 2018
- Riza Fauziah, Muhtadi. jurnal pengembangan masyarakat yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

### Buku – buku

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Bandung: Alfabeta
- Aziz, Moh. Ali, dkk. (2005) pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Dunn, William N. 2003. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT Refika Aditama. Bandung, 2006.
- Hetzer, E. 2012. Central and Regional Government, Jakarta: Gramedia
- Hogwood. B. W. & Gunn. L. A. 1984. Policy Analysis For The Real World. London: Oxford University Press. Diperoleh melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/18726/18268>
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko 2012. Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

- Maryani, D., & Roselin, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kinerja Kebijakan*. Edisi Kelima, Revisi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2008) *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabet.
- Permana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz MEDIA.
- Purwanto, E.A. dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Medika.
- Soekarno. 2003. *Public police*. Surabaya Airlangga University Press
- Soesanto, 2011. *Program kerja daerah dan permasalahannya*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 224.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016
- Sutojo. 2015. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang sehat*, Jakarta : Damar Media Pustaka
- Tanaka, Nao. (2015) *Teknologi Tepat Guna & Dunia Alternatif*. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada.
- Thoha, Miffah, 1998. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Tjokroamidjojo, 1993. *Manajemen Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 32. 71 Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), hal. 62
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia.

### **Peraturan – peraturan**

Dokumen Peraturan Menteri Desa , Pembanguna Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah